

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL  
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN  
DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan untuk Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**GITA SAPUTRI  
NPM: 1651010434**

**Prodi : Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/202M**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL  
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN  
DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan untuk Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**GITA SAPUTRI  
NPM: 1651010434**

**Prodi : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I: Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt.**

**Pembimbing II: Dimas Pratomo, M.E.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

## ABSTRAK

Negara Indonesia tak lepas dari masalah pengangguran. Masalah pengangguran tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional, akan tetapi juga terjadi pada lingkup regional, seperti pada Provinsi Lampung, dimana persentase tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung yang berfluktuasi. Dalam menurunkan tingkat pengangguran peran penting pemerintah sangat dibutuhkan. Melalui kebijakan Desentralisasi Fiskal pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan daerah perekonomian, antara lain pengangguran. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung selama periode 2010-2020 serta bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap Desentralisasi Fiskal dalam mengatasi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan data panel dan diolah menggunakan program Eviews 9 dalam proses entry data, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, estimasi regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, variabel Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung, Belanja Pegawai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung, variabel Belanja Barang dan Jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung, variabel Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini menurut pandangan perspektif ekonomi islam Pendapatan daerah belum sepenuhnya terealisasi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam penelitian ini APBD lebih disarankan diarahkan untuk belanja yang memiliki manfaat untuk seluruh masyarakat bukan hanya golongan tertentu hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal, PAD, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Pengangguran.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Gita Saputri

NPM : 1651010434

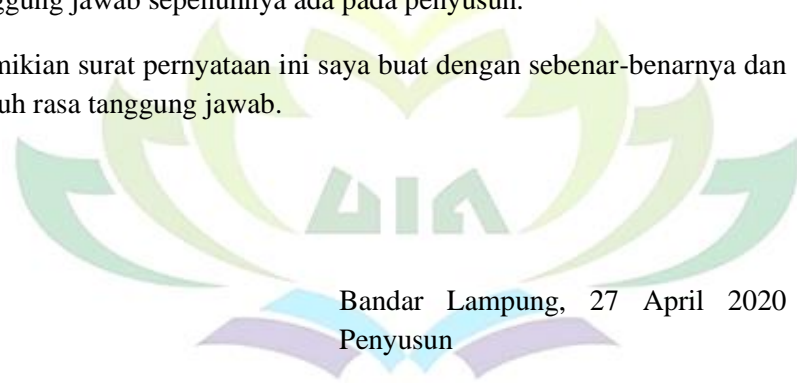
Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk serta disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.



Bandar Lampung, 27 April 2020  
Penyusun

Gita Saputri  
NPM: 1651010434



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul : Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat  
Pengguguran di Provinsi Lampung Menurut  
Perspektif Ekonomi Islam**

**Nama : Gita Saputri  
NPM : 1651010434  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam  
sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt.  
NIP. 198308152006042004**

**Pembimbing II**

**Dimas Pratomo, M.E.  
NIP. 199305282018011003**

**Menyetujui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Madnasir, S.E., M.Si  
NIP. 197504242002121001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam**, disusun oleh Gita Saputri, NPM. 1651010434, Jurusan Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: **Selasa, 04 Mei 2021.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. Rubhan Masykur, M.Pd.**

**Sekretaris : Diah Mukminatul Hasimi, S.E., M.E.Sy**

**Penguji 1 : Dr. Heni Novitarita, S.E., M.Si.**

**Penguji 2 : Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt**

**Penguji 3 : Dimas Pratomo, M.E.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Ruslan Abdol Ghofur, S.Ag., M.Si.  
NIP. 198008012003121001**

## MOTO

وَأَبْتِغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ  
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

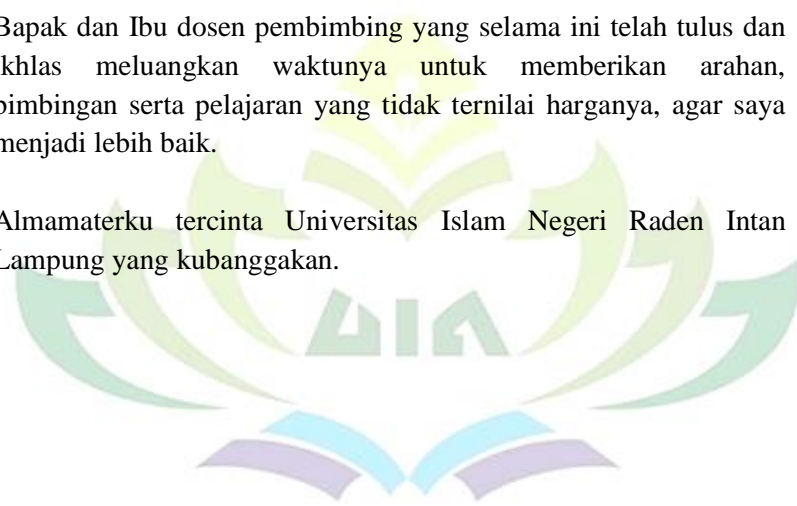
(QS.AL QASHASH AYAT 77)



## PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Skripsi ini dibuat dan dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta. Ayahanda Sukiyun dan Ibunda Yuliah (Alm) yang selalu menyayangiku, memberi dukungan, menasehati dan berkorban serta selalu mendoakan disetiap langkah perjalanan hidupku.
2. Kakak ku tersayang Della Yunita Sari S.Pd, Meishi Dwi Astuti S.Pd, serta adikku tercinta Rahma Apriani yang selalu memberiku semangat, kasih sayang, cinta, dan motivasi serta dukungan untuk menyelesaikan studi ini.
3. Kepada anakku tercinta Muhammad Rayyan Alfarzel yang selalu membuatku kuat sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang kubanggakan.





## RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Gita Saputi, lahir di Way Kanan pada tanggal 11 Oktober 1997, yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ayah Sukiyun dan Ibu Yuliah (Alm).

Jenjang pendidikan formal yang pernah penulis tempuh adalah:

1. SDN 01 Kurnia Agung Kabupaten Tulang Bawang, lulus pada tahun 2010.
2. SMPN 01 Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, lulus pada tahun 2013
3. SMK YP Al- Fajar Kabupaten Way Kanan, lulus pada tahun 2016

Pada tahun 2016 penulis diterima dan aktif di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam** sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Program studi Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan 1,2 dan 3 yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si. selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kebijaksanaan dan dengan sabar membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Dimas Pratomo, M.E. selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan meluangkan banyak waktu untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak dan ibu dosen serta staff Program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan, baik perpustakaan pusat maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu memberikan informasi tentang referensi dan lain-lain selama penulis kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan, Febri Maharani Putri, Fika Krismaranti, Sela Indah Pamela yang setia menemani di saat suka maupun duka dan keluarga besar kelas F serta teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Angkatan 2016 yang telah membantu dan menemani masa-masa kuliah.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT., mencatat amal kebaikan dan membalas jasa baik kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal'alamin*  
Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.



Bandar Lampung, April 2021  
Penulis,

**Gita Saputri**  
**NPM: 1651010434**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	12
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengangguran .....	20
1. Pengertian Pengangguran .....	20

2. Teori Pengangguran.....	22
3. Jenis-jenis Pengangguran .....	25
4. Faktor-faktor Pengangguran .....	28
5. Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	30
B. Desentralisasi Fiskal.....	33
1. Pengertian Desentralisasi Fiskal .....	33
2. Struktur APBD .....	34
a. Pendapatan Daerah .....	35
b. Belanja Daerah .....	38
3. Desentralisasi Fiskal Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	52
C. Kerangka Pemikiran .....	60
D. Hipotesis.....	62

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian .....	65
B. Populasi dan Sampel .....	65
1. Populasi .....	66
2. Sampel.....	66
C. Definisi Oprasional Variabel .....	67
1. Variabel Terikat ( <i>Variable Dependen</i> ) .....	67
Variabel Bebas ( <i>Variable Independen</i> ).....	68
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	70

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung .....	73
1. Geografis Provinsi Lampung .....	73
2. Topografi Provinsi Lampung.....	74
3. Penduduk dan Ketenagakerjaan.....	76
B. Analisis Deskripsi Objek Penelitian .....	78
1. Pengangguran .....	78
2. Desentralisasi Fiskal .....	80
C. Analisis Data .....	88
1. Uji Normalitas .....	84

2. Analisis Regresi Linear Berganda .....	85
3. Hasil Uji Hipotesis .....	88
a. Pengujian Parsial (Uji Statistik t).....	88
b. Pengujian Simultan (Uji Statistik F) .....	90
4. Koefisien Determinasi .....	91
<b>D. Pembahasan .....</b>	<b>93</b>
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung .....	93
2. Pegaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung .....	96
3. Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung .....	98
4. Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung .....	100
5. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung.....	103
6. Tinjauan Ekonomi Islam Menegnai Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung .....	105

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	116

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Lampiran**

## DAFTAR TABLE

1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung .....	3
1.2 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung... 6	6
1.3 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung .....	8
1.4 Ringkasan Tinjauan Pustaka.....	14
3.1 Definisi Oprasional Variable .....	70
4.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin .....	77
4.2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka .....	76
4.3 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	81
4.4 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung.....	82
4.5 Hasil koefisien regresi linear berganda.....	85
4.6 Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	88
4.7 Hasil uji simultan (Uji F).....	91
4.8 Hasil Koefisien Determinasi.....	92
4.9 Tingkat PAD dan TPT.....	94
4.10 Realisasi Belanja Pegawai dan Tingkat Pengangguran.....	99
4.11 Realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.....	101



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir ..... 61

Gambar 4.1 Grafik normalprobability plot ..... 84





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Guna memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami makna judul dari skripsi ini, yaitu: **Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam**. Serta untuk memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini penulis akan menguraikan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Peneliti perlu menjelaskan secara singkat istilah yang terdapat pada proposal ini, yaitu:

1. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara suatu variabel dengan variabel yang lain.<sup>1</sup>
2. Desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang yang lebih luas dari departemen kepada pemerintah local dan didukung dengan dana. Jadi secara tegas ada tugas kegiatan dan biayanya (*budget*).<sup>2</sup>
3. Desentralisasi Fiskal merupakan mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitannya kebijakan keuangan Negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*Fiscal Sustainability*) dan memberikan stimulasi terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.<sup>3</sup>
4. Pengangguran, Sukirno mendefinisikan pengangguran sebagai seseorang yang sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>4</sup>
5. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada al-Quran dan Hadist. Para ulama, khususnya ahlusunnah wal

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfa Beta 2007), H.7.

<sup>2</sup> Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonseia*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), H.348.

<sup>3</sup> Ibid.,H.348.

<sup>4</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), H. 272.

jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam adalah al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas..<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap masalah pengangguran di wilayah provinsi Lampung menurut perspektif ekonomi islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pengangguran menjadi isu yang sangat serius di berbagai negara, terutama negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia. Angka pengangguran di sebuah negara sering kali digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi dan industri di negara tersebut.

Sebagai negara berkembang, Negara Indonesia tak lepas dari masalah pengangguran. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja adalah salah satu faktor penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Salah satu faktor yang menentukan kemakmuran seseorang adalah tingkat pendapatannya. Dengan seseorang menganggur maka akan mengurangi tingkat pendapatan yang akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.<sup>6</sup> Masalah pengangguran tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional, akan tetapi juga terjadi pada lingkup regional, seperti pada Provinsi Lampung dimana persentase tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung masih berfluktuasi. Hal ini menjadi masalah yang harus diatasi baik itu oleh pemerintah atau pihak yang terkait, karena dengan menurunnya tingkat pengangguran akan meningkatkan kemakmuran di Provinsi Lampung.

Berikut tabel angka Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Lampung:

---

<sup>5</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.16

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 86-89

**Tabel 1.1**  
**Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung**  
**Tahun 2010-2020**

<b>Tahun</b>	<b>TPT Jiwa (000)</b>	<b>TPT (%)</b>
2010	220,6	5,57
2011	229,6	6,38
2012	192,7	5,20
2013	209,5	5,69
2014	184,3	4,79
2015	196,8	5,14
2016	190,3	4,62
2017	176,2	4,33
2018	171,6	4,06
2019	171,4	4,03
2020	209,6	4,67

**Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung 2010-2020**

Pada table 1.1 terlihat jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung pada tahun pada tahun 2010 sebesar 5,57 persen kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 6,38 persen dan meningkat kembali pada tahun 2013 sebesar 5,69 persen, tahun 2014 turun menjadi 4,79 persen dan kembali meningkat di tahun 2015 menjadi 5,14 persen. Pada tahun 2016 sampai tahun 2019 jumlah TPT menurun hal ini berdampak baik bagi masyarakat provinsi Lampung, namun pada tahun 2020 TPT kembali meningkat sebesar 4,67 persen dan peningkatan meningkat lebih tinggi dari empat tahun sebelumnya yaitu tahun 2016-2019.<sup>7</sup>

Tingkat pengangguran di Provinsi Lampung berfluktuasi pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan akan tetapi ditahun 2020 TPT kembali meningkat sebesar 4,67 persen dan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,64 persen, peningkatan TPT ini salah satunya adalah para Pekerja Migran Indoneisa (PMI) dan

---

<sup>7</sup> Labor Force Situation of Lampung Province, *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Lampung 2018*, (Lampung : BPS-Statistics Lampung Province), H.18

Calon Pekerja Migran (CPMI) asal Lampung banyak yang dipulangkan ke tanah air termasuk provinsi Lampung sebanyak 1.654 orang dengan alasan kehabisan masa kontrak dan dampak dari *Covid 19*. Selain itu pada data BPS adanya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung hingga tahun 2020 masih didominasi penduduk bekerja berpendidikan rendah SD 42,77 persen, SMP 21,30 persen sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah keatas SMA umum 16,85 persen, SMA kejuruan 9,34 dan pendidikan diploma hingga sarjana sebesar 9,34 persen.<sup>8</sup> Hal ini harus di atasi oleh pemerintah provinsi Lampung agar tingkat pengangguran di Provinsi Lampung dapat berkurang.

Teori Keynes mengatakan bahwa masalah pengangguran terjadi akibat permintaan *agregat* yang rendah. Timbulnya masalah pengangguran ini juga akan memicu kendala dalam perkembangan kondisi perekonomian, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya pengeluaran *agregat* sebagai faktor utama munculnya pengangguran. Pengeluaran *agregat* merupakan belanja yang akan dilakukan dalam perekonomian pada saat waktu tertentu pada berbagai tingkat pendapatan Negara. Menurut Keynes, masalah pengangguran ini harus ada campur tangan dari pemerintah karena hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Selain itu juga peran penting pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan secara merata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan,

---

<sup>8</sup> Pengangguran di Lampung bertambah 15.20 orang tahun 2020 tersedia di: <https://m.republika.co.id>

serta meningkatkan taraf hidup rakyat miskin. Peran penting pemerintah yaitu melalui kebijakan Desentralisasi Fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat mengatasi ketidakseimbangan fiskal yang berdampak pada masalah perekonomian termasuk masalah pengangguran. Kebijakan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bukan hanya untuk para pekerja dengan tingkat pendidikan rendah tetapi juga agar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk yang berpendidikan tinggi agar dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan.

Desentralisasi Fiskal adalah mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitannya kebijakan keuangan Negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*Fiscal Sustainability*) dan memberikan stimulasi terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.<sup>9</sup> Melalui kebijakan desentralisasi fiskal ini pemerintah pusat memberi wewenang kepada masing-masing daerah untuk mengatur atau mengelola keuangan daerah itu sendiri agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat di daerah masing-masing. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengatur belanja daerah yang tepat dapat membuat permintaan *agregat* meningkat sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.<sup>10</sup>

Pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemerataan pembangunan. Selain diberi kewenangan untuk menggali sumber keuangan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah juga memperoleh dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan pendapatan Lain-lain yang sah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian. Kebijakan desentralisasi

---

<sup>9</sup> Ai Siti Farida, Op.Cit, H.348.

<sup>10</sup> Budi Mulyana, et al., Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia, (Jakarta: LPKPAP, 2006), H. 69.

dan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2000, merupakan peluang bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing.<sup>11</sup> Instrumen Desentralisasi Fiskal yang pertama yaitu Pendapatan Daerah. Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai macam penerimaan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan.<sup>12</sup> Pendapatan daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh peningkatan pendapatan daerah (APBD).

Berikut perkembangan realisasi pendapatan daerah di Provinsi Lampung Tahun 2010-2020:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung**  
**Tahun 2010-2020 (Rp)**

<b>TAHUN</b>	<b>PAD X1</b>	<b>DANA PERIMBANGAN X2</b>
2010	1.118.340.908	908.420.168
2011	1.395.675.721	1.063.287.255
2012	1.687.701.199	1.280.851.522
2013	1.771.297.935	1.384.043.537
2014	2.274.685.573	1.472.486.569
2015	2.247.342.668	1.514.291.529
2016	2.368.796.251	1.821.186.563
2017	2.750.582.686	4.028.319.627
2018	2.864.235.753	2.816.327.378
2019	3.018.065.781	2.672.195.349
2020	2.699.822.477	4.191.460.293

**Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2010-2020**

---

<sup>11</sup>Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonseia*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), H. 346

<sup>12</sup> Kajian Ekonomi dan Keuangan Regioanal, (Lampung: Bank Indonesia, 2018), H. 40.

Pada table 1.2 terlihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2010-2020 pada tiap tahunnya meningkat. Namun pada tahun 2020 pendapatan mengalami penurunan, PAD pada tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 turun dari tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp3.018.065.781,- menjadi Rp 2.699.822.477,-

Pemerintah harus meningkatkan kembali pendapatan daerah karena dengan peningkatan pendapatan daerah yang tinggi, pemerintah daerah dapat membuat perekonomian bergerak kearah yang dinamis sehingga akan menarik minat dari pelaku usaha melakukan investasi yang berdampak pada penambahan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang ada dan pengangguran akan semakin menurun.<sup>13</sup>

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik tidak hanya terbatas pada sistem penerimaan pemerintah daerah saja, tetapi juga menyangkut efisiensi dalam pengalokasian pendapatan pemerintah daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Dari pengeluaran/belanja daerah inilah pemerintah daerah diharapkan dapat menekan jumlah tingkat pengangguran didaerah tersebut. Pengeluaran pemerintah ialah salah satu instrument penting guna mengontrol perekonomian. Pada sekian banyak komponen yang ada pada laporan APBD di sebutkan jika kinerja keuangan bisa terpengaruh dengan adanya belanja daerah. Diartikan semakin banyak belanja maka makin tinggi juga produktivitas perekonomian, pada hal ini ialah kinerja keuangan pemerintah diukur.<sup>14</sup>

Berikut perkembangan realisasi belanja daerah di Provinsi Lampung Tahun 2010-2020:

---

<sup>13</sup> Walalangi, Stasya, Rosalina A.M. Koleangan dan Hanly F.DJ. Siwu, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado*, (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi:2017),Vol.17 No., Hal.171-182.

<sup>14</sup> Wardana, Rangg, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap PDRB (Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat)*, (Fakultas Ekonomi Universitas AndalasPadang, Sumatera Barat) Skripsi 2014.

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Belanja Daerah**  
**Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010-2020 (Rp)**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Pegawai X3</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa X4</b>	<b>Belanja Modal X5</b>
2010	501.453.079	525.914.922	425.809.200
2011	548.948.015	683.987.620	631.250.022
2012	623.318.701	925.181.888	831.950.660
2013	598.139.708	1.191.843.462	804.089.325
2014	653.359.745	1.274.956.923	925.454.683
2015	791.283.320	1.237.307.069	868.999.195
2016	839.305.948	1.059.030.949	1.067.238.598
2017	1.797.829.304	1.367.228.489	1.451.484.673
2018	1.815.006.923	1.039.826.167	1.729.327.433
2019	1.927.670.921	1.277.425.573	1.013.880.674
2020	2.049.405.322	1.053.290.170	633.538.178

**Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2010-2020**

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa belanja daerah pada tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Belanja Pegawai pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tahun 2013 dari Rp623.318.701,- menjadi Rp598.139.708,- dan kembali meningkat pada tahun berikutnya, kenaikan tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.049.405.322,-. Belanja Barang dan Jasa berfluktuasi begitu juga dengan Belanja Modal akan tetapi belanja Modal mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2018-2020 Belanja Modal pada tahun 2020 sebesar Rp633.538.178,-

Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Dalam pengalokasi anggaran belanja yang tinggi juga diharapkan mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran apabila



pelaksanaan yang sudah direncanakan mencapai target yang udah dianggarkan.<sup>15</sup> Melalui belanja daerah diharapkan agar APBD terealisasi secara adil dan merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut, seperti pada masa Rosulullah Saw.

Q.S Al-Hasyr Ayat 7 menjelaskan tentang keadilan dan terdistribusinya seluruh harta kekayaan agar harta itu tidak beradar pada orang-orang tertentu, yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ  
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا  
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

*Artinya: "Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."<sup>16</sup>*

---

<sup>15</sup>Ogujiuba K, *Capital Budget Implementation in Nigeria: Evidence from the 2012 Capital Budget*, (Contemporary Economic:2014),Vol. 8 No.2, Hal. 299-314.

<sup>16</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S Al Hayr (24) :7

Ayat diatas menjelaskan tentang Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada masa Rosulullah dimana pada masa Rosulullah, dana yang masuk dan dana yang disalurkan/dikeluarkan harus seimbang. Dengan artian seluruh pendapatan harus disalurkan secara adil dan merata agar seluruh harta kekayaan itu tidak beradar dan dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Begitu juga dengan kebijakan desentralisasi fiskal di era sekarang diharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal ini seluruh masyarakat merasakan kekayaan yang diperoleh oleh daerah tersebut.

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu meneliti pengaruh desentralisasi fiskal dengan menggunakan variabel yang sama namun menunjukkan perbedaan hasil penelitian.

Yang pertama penelitian ini dilakukan oleh Riski Prasetyo Putro dengan judul penelitian Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran diwilayah Sumatra. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, dapat dikatakan bahwa setiap seratus miliar Rupiah PAD yang dihasilkan akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,15% begitu juga dengan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Peningkatan belanja pegawai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran karena belanja pegawai lebih banyak dinikmati oleh pegawai negeri sipil daerah, bukan rakyat secara langsung.<sup>17</sup>

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Gede Cintya Adriani dan I Nyoman Mahaendra Yasa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Daerah tidak Langsung di Kabupaten/Kota Bali. Berdasarkan hasil analisis Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja tidak langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan

---

<sup>17</sup> Riski Prasetyo Putro, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran Di wilayah Sumatra*, (Indonesian Treasury Review 2016), Vol.1, No.2, H.85-100.

terhadap tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran melalui belanja tidak langsung pada kabupaten/ kota di Provinsi Bali<sup>18</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Mudawali dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan. Dari penelitiannya mendapatkan hasil bahwa realisasi belanja daerah berpengaruh negatif serta signifikan terhadap pengangguran. Apabila realisasi belanja meningkat maka akan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan juga mengurangi tingkat kemiskinan. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah pentingnya bagi pemerintah aceh dan kabupaten/kota di aceh untuk meningkatkan optimalisasi belanja daerah, terutama belanja modal karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran serta mengentaskan kemiskinan.<sup>19</sup>

Dari penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran serta tinjauan ekonomi islam terhadap tingkat pengangguran di provinsi Lampung berlandaskan pada latar belakang penelitian ini. Maka sangatlah penting bagi peneliti untuk membahas hal ini sesuai dengan kemampuan peneliti, dengan judul penelitian: ***Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam.***

---

<sup>18</sup> Ni Luh Gede Cintya Adriani, I Nyoman Mahaendra Yasa, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Daerah tidak Langsung di Kabupaten/Kota Bali*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 2015, Vol.4, No.11, H. 1351.

<sup>19</sup> Iqbal Mudawali. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan*. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2013. H.98

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dalam menyelesaikan masalah pengangguran di wilayah Lampung melalui desentralisasi fiskal maka peneliti membatasi penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran di provinsi Lampung. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan daerah, antara lain pengangguran. Dimana variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pendapatan daerah yang meliputi: PAD, Dana Perimbangan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal merupakan variabel X (*independen*) dan tingkat pengangguran yang merupakan variabel Y (*dependen*). Batasan penelitian ini yaitu dengan melibatkan variabel tingkat pengangguran terbuka di provinsi Lampung, realisasi pendapatan daerah yaitu PAD, DAU, DAK, DBK dan Pendapatan Lain-lain yang serta realisasi belanja pegawai, realisasi belanja barang dan jasa serta realisasi belanja modal.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Pegawai terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung?
5. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung?
6. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap Desentralisasi Fiskal dan tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.
2. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.
3. Mengetahui pengaruh Belanja Pegawai terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.
4. Mengetahui pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.
5. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.
6. Mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap Desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu :

### **1. Secara teoritis**

- a. Dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung ditinjau dari perspektif ekonomi islam tahun 2010-2020.
- b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang tingkat pengangguran di Provinsi Lampung secara praktis.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah  
Agar menjadi bahan dasar pertimbangan pemerintah Provinsi Lampung dalam mengevaluasi efektifitas kebijakan fiskal dalam menurunkan angka pengangguran.
- b. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menambah wawasan terhadap permasalahan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi referensi penelitian berikutnya dengan topik serupa. Penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan didalam perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**G. Tinjauan Pustaka**

Berbagai penelitian tentang instrumen desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran yang telah dilakukan sebelumnya.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Tinjauan Pustaka**

	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Riski Prasetyo Putro (2016)  Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Volume. 1, No.2	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatra Selatan	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel dan teknik analisis regresi linier berganda.	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran pada dua tahun berikutnya, sedangkan belanja barang dan jasa justru berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan

				belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
2	Kusuma Wijaya (2019)	Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Kemiskinan dan Pengangguran	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data yang dianalisis menggunakan WarpPLs	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi berdampak positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Namun, dampak signifikan positif pada kesejahteraan sosial, dan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan berdampak pada kemiskinan. Sementara pertumbuhan ekonomi positif dampak signifikan terhadap kesejahteraan, positif tidak signifikan berdampak pada kemiskinan dan dampak signifikan positif terhadap tingkat pengangguran.
3	Ni Luh Gede Cintya Adriani dan I Nyoman	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data	Berdasarkan hasil analisis Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan

	<p>Mahaendra Yasa (2015)</p> <p>E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Volume. 4, No.11</p>	<p>gan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Daerah tidak Langsung di Kabupaten/Kota Bali</p>	<p>panel dan teknik analisis regresi linier berganda</p>	<p>terhadap belanja tidak langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Bali, namun sedangkan belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran melalui belanja tidak langsung pada kabupaten/ kota di Provinsi Bali</p>
4	<p>Setiyawati dan Hamzah (2007)</p> <p>Jurnal Akuntansi dan Keuangan</p>	<p>Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja pembangunan terhadap pertumbuhan</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Studi ini menggunakan data panel dan alat analisis</p>	<p>Dari penelitiannya mendapatkan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan negative terhadap pengangguran, DAU berpengaruh signifikan negative terhadap</p>



	Indonesia Desember, Vol.4, No. 2	han ekonomi, kemiskinan dan pengangguran	Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM).	pengangguran dan DAK berpengaruh signifikan negative terhadap pengangguran
--	-------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah objek penelitian ini yang dilakukan di provinsi Lampung sedangkan penelitian sebelumnya di daerah Jawa dan Sumatra Selatan. Kemudian variabel bebas (*Variabel Independent*) yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka dalam penelitian ini menggunakan empat variabel bebas (*Variabel Independent*) yaitu Variabel bebas pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), kedua Dana Perimbangan (X2) ketiga Belanja Modal (X3) Belanja Barang dan Jasa (X4) serta yang kelima Belanja Modal (X5). Penelitian sebelumnya hanya menggunakan beberapa variabel bebas yang ada dipenelitian ini.

Rentan waktu yang digunakan penulis yaitu periode 2010-2020 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan rentan waktu 2007-2016. Penulis juga mencantumkan “perspektif ekonomi islam” dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang konvensional akan tetapi dilihat secara perspektif Islam juga.

## H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara keseluruhan, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan

pedoman penulisan skripsi. Berikut penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai:

#### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

#### 2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

##### BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari :

1. Penegasan Judul
2. Latar Belakang Masalah
3. Identifikasi dan Batasan Masalah
4. Tujuan Penelitian
5. Manfaat Penelitian
6. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
7. Sistematika Penulisan.

##### BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis

Bab ini berisi Landasan teori yang berisi tentang:

###### A. Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran
2. Teori Pengangguran
3. Jenis-jenis Pengangguran
4. Faktor-faktor Pengangguran
5. Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi Islam

###### B. Desentralisasi Fiskal

1. Pengertian Desentralisasi Fiskal
2. Struktur APBD
3. Desentralisasi Fiskal Menurut Perspektif Ekonomi Islam

###### C. Hubungan Antar Variabel

D. Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

### BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

A. Waktu dan Tempat Penelitian

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

C. Populasi, Sample dan Teknik Pengumpulan Data

D. Definisi Oprasional Variabel

E. Teknik Pengolaha dan Analisa Data

### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan Pembahasan penelitian kuantitatif dan statistik. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam:

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

B. Analisis Deskripsi Objek Penelitian

1. Pengangguran

2. Desentralisasi Fiskal

C. Analisis Data

D. Pembahasan

### BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengangguran

#### 1. Definisi Pengangguran

Pengangguran dalam bahasa Inggris *unemployment*, sedangkan dalam bahasa Arab adalah *faragh* merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.<sup>20</sup>

Beberapa pakar ekonomi mendefinisikan pengangguran sebagai berikut:

- a. Sadono Sukirno mendefinisikan pengangguran sebagai seseorang yang sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran.<sup>21</sup>
- b. Murni mengungkapkan, pengangguran adalah orang-orang yang usianya berada dalam usia angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan.<sup>22</sup>
- c. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), H.8.

<sup>22</sup> Murni, *Ekonomika Makro*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), H.197.

<sup>23</sup> Mankiw, *Teori Makroekonomi*, (Jakarta : Erlangga:2013), H.154

- d. Amir Machmud mendefinisikan pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.<sup>24</sup>
- e. Todaro, Michael P, dan Smith dalam buku *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan* mendefinisikan pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan.<sup>25</sup>

Dari beberapa definisi pengangguran diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan namun mereka melakukan usaha secara aktif (mencari pekerjaan) namun tidak mendapatkannya ataupun penduduk yang tidak melakukan usaha (mencari pekerjaan) dengan usia angkatan kerja (15-64 tahun).

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan:

- a. Pendekatan Angkatan Kerja (Labour force approach)  
 Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{JUMLAH TINGKAT PENGANGGURAN}}{\text{JUMLAH ANGKATAN KERJA}} \times 100\%$$

---

<sup>24</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indoneisa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga 2016), H.260.

<sup>25</sup> Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), H.307.

- b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)
- 1) Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
  - 2) Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

## 2. Teori Pengangguran

### a. Teori Klasik

Teori Klasik ini menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga.<sup>26</sup>

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004). H..

<sup>27</sup> Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Jakarta: Kanisius, 2000). H. 2

## b. Teori Keynes

Berbeda dengan pandangan aliran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith tersebut, John Maynard Keynes sebagaimana disebutkan dalam Sukirno, menganggap bahwa pemerintah memiliki peranan dalam mengurangi pengangguran karena kesempatan kerja penuh pada sistem pasar bebas jarang tercapai.<sup>28</sup> Hal ini dikarenakan adanya kekurangan permintaan agregat sehingga penawaran agregat menurun. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pemerintah sangat penting untuk mengatasi masalah pengangguran.

Teori Keynes mengatakan bahwa masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

---

<sup>28</sup> Sadono Sukirno, Op.Cit., hlm. 472

c. Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Dalam dia punya esai yang orisinal, Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Dia mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara “deret hitung” (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya). Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan.

Dari kedua uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan. Dalam jangka panjang tidak ada kemajuan teknologi yang mampu mengalihkan keadaan karena kenaikan supply makanan terbatas sedangkan “pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia”. Apabila ditelaah lebih dalam teori Malthus ini yang menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.



d. Teori Sosiologi Ekonomi No-Marxian

Awal dari analisis Marx pada awal abad 20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif. Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. Namun Marx yakin pada suatu saat apabila kapitalisme sudah muncul dengan demikian pesatnya maka akan memunculkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersebut. Dengan munculnya monopoli modal ini maka akan ada satu perusahaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis. Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut Marxian yang baru ini konsep “kelas buruh “ tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak mempunyai alat produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi.

### 3. Jenis-jenis Pengangguran

Jika dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya, maka Sadono Sukirno mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu<sup>29</sup>:

- a. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) terbuka yaitu tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum

---

<sup>29</sup> Sadono Sukirno., Op.Cit, H.10-11.

mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

- b. Pengangguran terselubung (*Disguised Unemployment*) yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, tetapi tidak mengurangi jumlah produksi.
- c. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari tujuh jam sehari.
- d. Pengangguran musiman Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan.

Pengangguran berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok<sup>30</sup>:

- a. Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Hal ini terjadi karena para pekerja meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya.

- b. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang.

---

<sup>30</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), H.328.

Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah.

c. Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Apapun jenis pengangguran akan berdampak pada seluruh lini kehidupan manusia, baik bidang perekonomian, sosial-politik, budaya bahkan agama. Dampak negatif pengangguran terhadap sektor perekonomian adalah masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya. Hal ini terjadi karena ketika ada pengangguran maka pendapatan riil masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensialnya sehingga tingkat kemakmurannya akan rendah pula.

#### **4. Faktor Pengangguran dan Dampaknya**

Pengangguran berhubungan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan, tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak

dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru.

#### 1) Factor-faktor Pengangguran

##### a. Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Tepat

Perekonomian dinegara berkembang pada umumnya di kategorikan kedalam dua sektor yaitu sektor subsistem dicirikan sebagai sektor lamban, tradisioanl, terbelakang dan memiliki pengangguran yang tidak kentara. Sector kedua yaitu sektor modern berupa pertambangan, perkebunan dan perindustrian. Pertumbuhan sector modern akan menyerap angkatan kerja dari sector tradisional sampai akhirnya tidak ada yang tersisah pada sector tradisional. Namun kenyataannya Negara berkembang tidak selalu bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan industry. Penggunaan teknologi yang kurang tepat menyebabkan penyerapan tenaga kerja menjadi kecil. Dilain sisi kurangnya upaya pelatihan tenaga kerja menyebabkan langkanya angkatan kerja yang memiliki skill, dan memaksa para pengusaha untuk memilih proses mekanisme.

##### b. Distorty Harga Faktor Produksi

Upah yang berlaku untuk tenaga kerja yang tidak memiliki skill di sekotr modern di Negara-negara berkembang seringkali melebihi tingkat upah keseimbangan pasar karena adanya kebijakan upah minimum dari pemerintah, tekanan serikat kerja, dan perusahaan asing yang beroperasi di Negara tersebut. Studi menunjukkan bahwa tingkat upah minimum yang tinggi menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Selain upah faktor yang mempengaruhi pengangguran adalah rendahnya baiaya capital dan pengangguran penduduk berpendidikan tinggi. Lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kurikulum, kelulusan dari pendidikan tinggi ini lebih suka memilih pekerjaan yang sesuai dengan

pendidikannya dan menolak untuk bekerja dibidang lain apalagi dengan tingkat upah dibawah standard.<sup>31</sup>

Menurut Todaro dan Smith , pengangguran di negara-negara sedang berkembang pada umumnya didominasi oleh pengangguran usia muda dan pengangguran berpendidikan. Hal ini di karenakan adanya revolusi pendidikan yang menyebabkan seseorang tanpa memikirkan kualitas dan hanya memikirkan kuantitasnya saja. Karena adanya peningkatan kebijakan pendidikan, sehingga hal inilah yang membuat banyak terjadinya pengangguran tenaga kerja terdidik di kota-kota besar sampai saat ini.

## 2) Dampak Pengangguran

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek (Sukirno,2000) dimana dua aspek tersebut yaitu:

### a. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit, serta pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan kelesuan kegiatan

---

<sup>31</sup> Todaro, Michael, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), H.32.

perusahaan yang rendah menyebabkan berkurangnya keinginan untuk melakukan investasi.

b. Akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran yaitu pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan dan pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.

## 5. Pengangguran Menurut Islam

Pengangguran berpotensi menimbulkan berbagai masalah di masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial-politik, budaya bahkan agama, seperti timbulnya kerawanan sosial, gejolak sosial dan politik, tindak kriminal dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Menurut Sadono Sukirno, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.<sup>32</sup>

Pengangguran bukanlah kodrat Ilahi yang tidak bisa dirubah. Pengangguran itu terjadi disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri. Allah SWT telah memberikan kekayaan alam yang melimpah dan akal yang tak ternilai harganya,

---

<sup>32</sup> Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi, edisi ke 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), H. 27

hanya saja bagaimana manusia mempergunakan kedua anugerah tersebut dengan baik dan benar. Dari sudut pandang islam, pengangguran bukanlah tanggung jawab mutlak dari pemerintah karena hal ini termasuk tanggung jawab berbagai pihak termasuk umat islam hal ini.

Menurut Qardhawi pengangguran terbagi menjadi 2 macam, yaitu<sup>33</sup>:

1. Pengangguran jabariyah, yang bermakna menganggur karena tidak ada pilihan lain sebab tidak mempunyai keterampilan.
2. pengangguran khiyariyah, yaitu orang yang memilih menganggur dan bergantung kepada orang lain padahal dia mempunyai kemampuan. Namun dia tidak pernah berusaha dan mengusahakan suatu pekerjaan apapun, kepribadiannya malas hingga menjadi "sampah masyarakat".

Islam sangat melarang untuk menganggur, larangan untuk menganggur karena hal ini dapat menyebabkan manusia berada pada zona kemiskinan sedangkan kemiskinan akan mendekatkan pada kekufuran. Perintah untuk bekerja banyak terdapat dalam al-Quran dan hadist, salah satunya terdapat pada QS.At-Taubah:105 berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

وَسْتَزِدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

---

<sup>33</sup> Yusuf al-Qardawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), H. 6-18.

*Artinya : “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>34</sup>*

Selain ayat diatas ada hadis yang menjelaskan tentang rezeki yang sudah Allah SWT tentukan. Dalam salah satu hadist yang berbunyi sebagai berikut<sup>35</sup>: “.....*Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani (nuthfah) selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah (‘alaqah) selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging (mudhgah) selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan empat perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya.....”<sup>36</sup>*

Dalam hadist tersebut telah disebutkan bahwa rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara dari setiap manusia sudah diketahui, dan ditetapkan oleh Allah sejak 40 hari dalam rahim ibu. Rezeki sudah ditetapkan namun bukan berarti manusia tidak harus bekerja dan berusaha lagi, manusia diketahui takdirnya oleh Allah dan bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Namun semua itu pula harus ada campur tangan pemerintah agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang sedang berusaha dalam mencari pekerjaan.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjamahannya, QS Attaubah (9): 105

<sup>35</sup> Syarh AL-Arbain AN-Nawawiyah Al-Mukhtashar. Cetakan Pertama, Tahun 1431 H. Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri. Penerbit Dar Kunuz Isybilya. Hal. 44-53.

<sup>36</sup> HR. Bukhari, no. 6594 dan Muslim, no. 2643

<sup>37</sup> AdiwarnaAzwar Makarim, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke tiga*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persda, 2007) H.



## B. Desentralisasi Fiskal

### 1. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Secara harfiah kata desentralisasi merupakan lawan dari kata sentralisasi yang dapat diartikan sebagai suatu pemusatan (*adjective*) berkaitan dengan suatu kewenangan (*Authority*) pemerintah, lalu ada istilah kantor pusat, pemerintah pusat dan sebagainya.

Meurut Machfud Sidik Desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang yang lebih luas dari departemen kepada pemerintah local. Jadi secara tegas ada tugas kegiatan dan biayanya (*budget*).<sup>38</sup> Sedangkan Desentralisasi Fiskal adalah mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitannya kebijakan keuangan Negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*Fiscal Sustainability*) dan memberikan stimulasi terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.<sup>39</sup>

Desentralisasi Kebijakan fiskal adalah komponen penting kebijakan publik. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Melalui undang-undang tersebut pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk menggali pendapatan dan melakukan fungsi alokasi secara mandiri dalam merencanakan dan menetapkan prioritas pembangunan.<sup>40</sup> Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang belum tuntas diantaranya adalah masalah pengangguran. Menurut Keynes dalam

---

<sup>38</sup>Machfud Sidik, *Desentralisasi Fiskal, Studi kasus DAU, DAK dan Dana Penyeimbang, paper yang dipresentasikan pada seminar nasional "Kebijakan keuangan anatara pemerinntahpusat dan daerah*, (Burobudur:Maret 2002), di Hotel Burobudur.

<sup>39</sup> Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonseia*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), H.348.

<sup>40</sup> Marianus Manek & Rudy Badrudin, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, (NTT: Telaah Bisnis, 2016) Volume 17, Nomor 2, H. 84.

Sukirno, pemerintah perlu campur tangan dalam mengatasi pengangguran melalui belanja pemerintah yang akan meningkatkan permintaan agregat. Kenaikan permintaan agregat akan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Secara umum, tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah<sup>41</sup>:

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian “*Kue Nasional*” baik vertical maupun horizontal.
2. Suatu upaya untuk meningkatkan efesinsi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan Negara dan manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemda yang besaran jumlahnya cukup signifikan melalui dana perimbangan, dengan begitu pemerintah daerah dapat mengolah sumber keuangan baik pendapatan daerah maupun biaya/belanja daerah tersebut. Sebagaimana Struktur APBD ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan sebgaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## **2. Struktur APBD**

Struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan sebgaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.<sup>42</sup>

Standar akuntansi pemerintahan, berikut struktur APBD yang terdiri dari :

---

<sup>41</sup> Ai Siti Farida., Op.Cit, H. 349.

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan*.

## a. Pendapatan Daerah

Agar dapat menjalankan roda perekonomian pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Keberhasilan kinerja pemerintah di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama isi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran. Berikut adalah sumber-sumber Pendapatan daerah terdiri dari<sup>43</sup>:

### 1) PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> DR. Machfud Sidik, M.Sc, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jogjakarta:Departemen Keuangan RI, 2002), H.7-18.

<sup>44</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011. H.99

Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.<sup>45</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota ditekankan pada kemampuannya dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Dimana pembiayaan itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing. Maka menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi masing-masing Pemkab/Pemko untuk menggali sumber keuangan daerahnya agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang maksimum guna menanggulangi semua aktivitas ataupun kegiatan pada setiap daerah, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Menurut Halim<sup>46</sup> rumus Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

---

<sup>45</sup> Pasal 157 Undang-Undang No. 32/2004 tentang *Pemerintahan Daerah* dan Pasal 6 Undang-Undang No. 33/2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

<sup>46</sup> Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, (Salemba Empat, Jakarta 2008), H.232.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:<sup>47</sup>

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup> Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
- Pajak Parkir

b. Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran

---

<sup>47</sup> Yuliati, *Akutansi sektor public cetakan kelima*, (Salemba Empat, Jakarta 2000), H.97

pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

## 2) Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, definisi dana perimbangan adalah Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>48</sup>

Menurut Widjaja Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.<sup>49</sup>

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (Otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan

---

<sup>48</sup> Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

<sup>49</sup>Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). H. 129

horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah.

Berikut klasifikasi Dana Perimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:

**a) Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Daerah yang memiliki kekayaan alam dan penghasilan pajak akan memiliki penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya. Hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut dialokasikan kepada daerah-daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dengan menggunakan prinsip *by origin* (daerah penghasil) serta melihat realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>50</sup> DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

---

<sup>50</sup>Ibid.

## **b) Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Dana alokasi umum adalah dana perimbangan untuk daerah yang sudah dialokasikan dalam APBN berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan neto dalam negeri yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek keadilan dan pemerataan yang selaras dengan pembangunan pemerintah dan perhitungan alokasi umumnya ditetapkan sesuai dengan Undang-undang.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat block grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Menurut Awaniz Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.<sup>51</sup>

Indraningrum mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (*block grant*) kepada pemerintah daerah, yaitu<sup>52</sup>:

- a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*)

---

<sup>51</sup> Awaniz, Berlian Nur, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karasidenan Pekalongan*. Skripsi. 2011 Universitas Negeri Semarang, H. 11

<sup>52</sup> Indraningrum Tri, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah )*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011, H.23



- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*)
- c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif
- d. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah

Sedangkan menurut Halim menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN.<sup>53</sup>

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

#### **c) Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan DAK antara lain untuk membantu daerah-daerah dengan

---

<sup>53</sup> Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, (Penerbit Salemba Empat: jakarta, 2016), H.127

kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana serta menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>54</sup>

Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.<sup>55</sup> Sebagai contoh, penggunaan DAK bidang pendidikan meliputi:

1. Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas
2. Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC,
3. Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan
4. Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah
5. Peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas pendidikan lainnya di sekolah.

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan

---

<sup>55</sup> *Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah "Inter-Governmental Fiscal Review*, Hal.81

pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis.<sup>56</sup>

### 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah Pusat dari APBN kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan yang mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Nurmalia Hasana dan Achmad Fauzi Belanja di lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.<sup>57</sup>

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

---

<sup>56</sup> PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 60 ayat (3)

<sup>57</sup> Nurmalia Hasana dan Achmad Fauzi, Akuntansi Pemerintah :In Media, Jakarta, 2017, hal. 125

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.<sup>58</sup>

Komponen belanja daerah atau pengeluaran daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.<sup>59</sup>

### 1) **Belanja langsung**

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung langsung mencakup:

#### **a. Belanja pegawai**

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

---

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ayat (1) Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

pembentukan modal . Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.<sup>60</sup> Belanja pegawai meliputi:

- Honorarium PNS
- Honorarium Non-PNS
- Uang Lembur
- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS

#### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat maupun pemerintah daerah dan belanja perjalanan<sup>61</sup>. Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pembelian barang dan pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana

---

<sup>60</sup> Ibid., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ayat (1) Tahun 2006

<sup>61</sup> Menti Keuangan Nomor:102/PMK02/2018 tentang Belanja Barang

mobilitas, sewa alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Belanja barang dan jasa meliputi:

- Belanja untuk kegiatan operasional meliputi belanja keperluan perkantoran, Belanja bahan habis pakai, Belanja bahan material, Belanja jasa kantor, Belanja premi asuransi, Belanja perawatan kendaraan bermotor, Belanja cetak dan pengadaan, Belanja sewa rumah/gedung/gudang parkir, Belanja sewa sarana mobilitas, Belanja sewa alat berat, Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan kantor, Belanja makanan dan minuman, Belanja pakaian dinas dan atribut, Belanja pakaian kerja, Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, Biaya perjalanan dinas, Belanja pemulangan pegawai.
- Belanja untuk non-operasional meliputi belanja biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun dan belanja non-operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja yang direncanakan.
- Belanja Jasa meliputi belanja jasa konsultan, belanja jasa profesi, belanja jasa pada Badan Layanan Umum dan belanja jasa lainnya.
- Belanja barang untuk diserahkan pada masyarakat/Pemda yang dikaitkan dengan tugas

fungsi dan strategi pencapaian target kinerja dalam kriteria belanja bantuan sosial meliputi belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan, irigasi serta belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

### **c. Belanja Modal**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah "...Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan."<sup>62</sup>

Menurut Halim Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.<sup>63</sup> Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.

Dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang

---

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>63</sup> Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), H.101.

digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan baik melalui pembelian maupun pembangunan.

Berikut klasifikasi Belanja Modal yang diatur dalam Dalam PSAP Nomor 02, belanja modal dapat diategorikan ke dalam lima kategori utama, yaitu:

- **Belanja Modal Tanah**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal adalah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan atau dipakai.

- **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Halim menjelaskan bahwa belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Pengertian dari belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi,



termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (*kontraktual*).

- **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas nimal nilai kapasitas jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

- **Belanja Modal Lainnya**

Belanja modal lainnya adalah Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat.

## 2) **Belanja tidak langsung**

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja. Belanja tidak langsung mencakup:

**a. Belanja pegawai**

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.<sup>64</sup>

Belanja pegawai meliputi:

- Gaji dan Tunjangan
- Tambahan Penghasilan PNS
- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
- Biaya Pemungutan Pajak Daerah

**b. Belanja Bunga Utang**

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang

---

<sup>64</sup> Ibid., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ayat (1) Tahun 2006

baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

**c. Belanja Hibah**

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.<sup>65</sup>

**d. Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa.<sup>66</sup>

**e. Bantuan sosial**

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

**f. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

---

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang *Mekanisme Pengelolah Hibah*.

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang *Klasifikasi Anggaran*.

### **g. Belanja tidak terduga**

Belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.<sup>67</sup>

### **3. Desentralisasi Fiskal Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam negara Islam kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu dari berbagai alat yang bekerja untuk mencapai tujuan Syariah. Secara teknis, seperti negara-negara lain, negara Islam juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban dan untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan agar mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dan mempromosikan tatanan ekonomi dan sosial yang *egaliter*. Pada sistem ekonomi Islam, hak pemilik swasta diakui, pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya. Hal ini merupakan komitmen yang bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang besar jumlahnya, tetapi juga membantu meningkatkan spiritual yang menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin.<sup>68</sup> Majid mengatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera pemerintah Islam menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakn moneter. Kebijakan tersebut telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah dan Khulafurasyiddin.<sup>69</sup>

Kebijakan fiskal dalam negara Islam tidak harus menjadi faktor penghambat. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah

---

<sup>67</sup> Ibid., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ayat (1) Tahun 2006.

<sup>68</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), H. 54

<sup>69</sup> M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf : Relevnasinya dengan ekonomi kekinian*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), H. 221.

satu faktor yang paling dominan adalah karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu faktor-faktor seperti sosial, budaya dan politik inklud di dalamnya. Tantangan Rasulullah sangat besar dimana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu baik dari kelompok internal maupun kelompok eksternal. Kelompok internal yang harus diselesaikan oleh Rasulullah yaitu bagaimana menyatukan antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin pasca hijrah dari mekah ke Madinaha (Yastrib).

Unsur-unsur utama dari teori fiskal Islam

- 1) Ekonomi Islam terdiri dari ekonomi tiga sektor, yaitu sektor swasta, sektor sosial/sukarela, dan sektor publik. Tiga sektor bekerja sama, memberikan kerangka kelembagaan pada perekonomian Islam
- 2) Zakat sebagai dasar dari sistem fiskal
- 3) Alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi dari ekonomi Islam diproses dan dilaksanakan melalui semua sektor tersebut secara bersama-sama
- 4) Peran sektor publik dibanding sektor lain adalah minimal tapi penting sejauh beroperasi terus menerus untuk memastikan alokasi optimal sumber daya yang ada dalam masyarakat, distribusi pendapatan, dan membangun stabilitas.

Adapun tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Dalam ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran islam seluas mungkin.<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> M. Nazori Majid., Op.Cit, H. 216.

Menurut Metwally, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam:

- 1) Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang telah tinggi
- 2) Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman
- 3) Ekonomi islam mempunyai komitmen yang membantu ekonomi masyarakat yang berkembang dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin

#### **a. Masa Pemerintahan Rasulullah s.a.w**

##### **1) Memfungsikan Baitul Maal**

Baitul maal sengaja dibentuk oleh Rasulullah s.a.w sebagai tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Karena pada awal pemerintahan Islam sumber utama pendapatannya adalah Khums, zakat, kharaj, dan jizya (bagian ini akan dijelaskan secara mendetail pada bagian komponen-komponen penerimaan negara Islam).<sup>71</sup>

Pendirian Baitul Maal ini masih banyak sumber yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan didirikan oleh Rasulullah s.a.w. dan ada sumber yang mengatakan bahwa secara resmi baitul maal didirikan oleh Sayidina Umar ibn Khatthab r.a. Di dalam buku Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatthab dikatakan bahwa salah satu keberhasilan beliau adalah mampu mendirikan Baitul Maal. Fungsi dari Baitul Maal adalah sebagai mediasi kebijakan fiskal Rasulullah s.a.w. dari pendapat negara Islam hingga penyalurannya. Tidak sampai lama harta yang mengendap di dalam Baitul Maal, ketika mendapatkannya maka langsung disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu kepada Rasul dan kerabatnya, prajurit, petugas Baitul Maal dan fakir miskin.

---

<sup>71</sup> Perwataatmajda, Karnaen, *Histry Of Islamics Economic*, Diktat Kuliah Ekonomi Islam UIN SYAHID Jakarta, 2006, h.14.

## 2) Pendapatan Nasional dan Partisipasi Kerja

Salah satu kebijakan Rasulullah s.a.w dalam pengaturan perekonomian yaitu peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum Muhajirin dan Anshor.<sup>72</sup>

Upaya tersebut tentu saja menimbulkan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga meningkatkan permintaan agregat terhadap output yang akan diproduksi. Disini lain Rasulullah membagikan tanah sebagai modal kerja. Kebijakan ini dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. karena kaum Muhajirin dan Anshor keahliannya bertani dan hanya pertanian satu-satunya pekerjaan yang menghasilkan. Kebijakan beliau sesuai dengan teori basis, yaitu bahwa jika suatu negara atau daerah ingin ekonominya maju maka jangan melupakan potensi basis yang ada di negara atau daerah tersebut.

## 3) Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah muslim berdasarkan atas jenis dan jumlahnya (pajak proposional). Misalnya jika terkait dengan pajak tanah, maka tergantung dari produktivitas dari tanah tersebut atau juga bisa didasarkan atas zonanya.

Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti *kharaj*, *jizyah*, *khumus*, dan *zakat* menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya *khumus*, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran *agregat*. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi.<sup>73</sup>

## 4) Kebijakan Fiskal Berimbang

Untuk kasus ini pada masa pemerintahan Rasulullah s.a.w dengan metode hanya mengalami sekali defisit

---

<sup>72</sup> Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf : Relevansinya dengan ekonomi kekinian*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003) h. 223.

<sup>73</sup> Azwar Makarim, *Ekonomi Makro Islam*, Depok: PT. Raja Grafindo Persda, 2004, h. 153.

neraca Anggaran Belanja yaitu setelah terjadinya “*Fathul Makkah*”, namun kemudian kembali membaik (surplus) setelah perang Hunain.<sup>74</sup>

5) Kebijakan Fiskal Khusus

Kebijakan ini dikenakan dari sektor *voulentair* (sukarela) dengan cara meminta bantuan Muslim kaya. Jalan yang ditempuh yaitu dengan memberikan pinjaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk Islam serta menerapkan kebijakan insentif.

**b. Masa Pemerintahan Abu Bakar**

Abu Bakar Ash-Shiddiq mendapat kepercayaan pertama dari kalangan muslim untuk menggantikan posisi Rasulullah saw setelah beliau wafat. Konon ada beberapa kriteria yang melekat pada diri Abu Bakar sehingga kaum muslimin mempercayai puncak kepemimpinan Islam diantaranya adalah terdapat ketaatan dan keimanan beliau yang luar biasa, faktor kesenioran diantara yang lain sehingga wibawa menjadi penentu. Juga faktor kesetiaan dalam mengikuti dan mendampingi Rasulullah dalam berdakwah menyadarkan kaum muslim bahwa beliau memang pantas menjadi pengganti Rasulullah saw. Pemilihan tersebut berlangsung secara alami tanpa ada intervensi dari Rasulullah saw.

Selama kurang lebih 27 bulan masa kepemimpinan beliau ada beberapa problematika sosial dalam negara Islam yang menjadi tantangan berat beliau. Beliau dihadapkan pada pembangkang-pembangkang seperti kaum yang murtad, cukai dan kelompok yang tidak mau membayar zakat kepada negara. Akhirnya Abu Bakar mampu mengatasinya dengan sebuah kebijakan disertai dengan pasukan lini terdepan untuk melakukan pemungutan zakat. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitiannya dalam mengelola dan menghitung zakat. Tebukti dengan ketelitian dan kehati-hatiannya beliau mengangkat seorang amil zakat yaitu Anas. Namun yang menarik dari kepemimpinan beliau adalah ketika

---

<sup>74</sup> Ibid., h. 224



beliau mendekati wafatnya, yaitu kebijakan internal dengan mengembalikan kekayaan kepada negara karena melihat kondisi negara yang belum pulih dari krisis ekonomi. Beliau lebih mementingkan kondisi rakyatnya dari pada kepentingan inividu dan keluarganya. Gaji yang selama ini diambil dari baitul maal yang ketika dikalkulasi berjumlah 8.000 dirham, mengganti dengan menjual sebagian besar tanah yang dimikinya dan seluruh penjualannya diberikan untuk pendanaan negara. Sikap tegas seperti ini belum kita temukan di negara kita tercinta ini. Bahkan yang terjadi sebaliknya, yaitu dipenghujung jabatannya justru mengeluarkan kebijakan yang dapat menguntungkan dirinya. Enggan mempublikasi kekayaan pribadi ketika KPK memeriksanya.

Berkaitan dengan kebijakan fiskal masa kekhalifahan Abu Bakar yaitu melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Hanya ada beberapa kebijakan fiskal beliau yang cukup dominan dibandingkan yang lain yaitu pemberlakuan kembali kewajiban zakat setelah banyak yang membangkangnya. Kebijakan berikutnya adalah selektif dan kehati-hatian dalam pengelolaan zakat sehingga tidak ditemukan penyimpanan di dalam pengelolaannya.<sup>75</sup>

### c. Masa Pemerintahan ‘Umar Ibn Khaththab ra

Ketika dilantik menjadi khalifah, Umar bin Khaththab mengumumkan kepada rakyat tentang pengaturan kekayaan negara Islam. Beliau berkata “Barang siapa ingin bertanya tentang Al-Qur’an, maka datanglah kepada Ubay bin Ka’ab. Barang siapa ingin bertanya tentang ilmu *fara’idh* (ilmu waris), maka datanglah kepada Zaid bin Tsabit. Barang siapa bertanya tentang harta, maka datanglah kepadaku, karena Allah SWT telah menjadikanku sebagai penjaga harta dan pembagi (distributor).<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Rasiam, Kebijakan Fiskal dalam Islam Solusi Bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi, Jurnal Of Studies Islam, 2014, Vol. 4 No. 1, h. 95.

<sup>76</sup> Muhammad, Op., Cit, H.19

Di samping itu, program penanggulangan kemiskinan tidak cukup kiranya jika hanya dilakukan dengan pendekatan yang developmentalistik saja. Akan tetapi penanggulangan kemiskinan perlu disertai dengan pendekatan yang mengandalkan “modal sosial” yang ada di masyarakat itu sendiri, berupa kebersamaan, gotong-royong, saling bantu dan saling percaya. Fakta di atas sudah membuktikan bahwa betapa pemerintah tak akan mampu berbuat banyak dalam proses penurunan angka kemiskinan tanpa menggandengkan tangannya dengan tangan-tangan usaha kelompok miskin untuk keluar dari jebakan kemiskinan serta merangkul peran-serta masyarakat sipil.

Adapun kebijakan Umar mengenai Subsidi Negara sebagai berikut: Negara harus memperhatikan apa yang dibelanjakan. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka hendaknya memperhatikan beberapa kaidah berikut ini:

- 1) Seharusnya tujuan dari pembelanjaan umum sudah direncanakan. Kekayaan umum tidak digunakan untuk kebathilan seperti penjajahan, memunculkan fitnah, melontarkan ide yang bertentangan dengan kebenaran, atau menanamkan modal dalam tindakan haram.
- 2) Negara juga harus melaksanakan dengan baik apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Zakat diberikan kepada mereka yang berhak sebagaimana yang diterangkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an: 9:60.
- 3) Pembagian harta hasil rampasan perang yang berjumlah 1/5 diberikan sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah SWT di dalam al-Qur'an: 59:7.
- 4) Seharusnya penggunaan harta umum sesuai dengan kadar yang diperlukan dan telah direncanakan, tanpa pemborosan dan tidak terlalu mengirit, karena pemborosan hanya menyia-nyiakan harta negara. Sementara kalau terlalu ditahan-tahan pengeluarannya, maka akan membuat proyek negara macet. Apabila dana pelayanan umum terlalu diirit, maka fasilitas umum akan

memburuk. Semua itu mengikuti petunjuk Allah SWT. Al-Qur'an: 25:67.

- 5) Seharusnya manfaat penggunaan kekayaan negara dikembalikan kepada rakyat, dan bukan kepada pribadipenguasa atau pejabat. Tidak pula dikhususkan untuk golongan atau kepentingan pribadi dengan mengesampingkan golongan lainnya.

#### **d. Masa Pemerintahan 'Ali Ibn Thalib r.a**

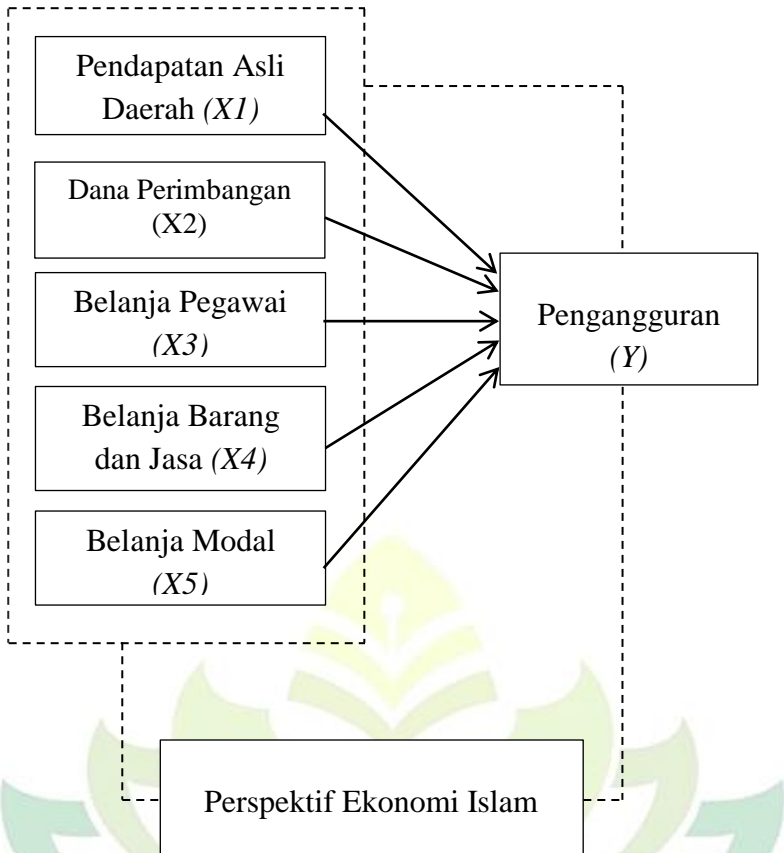
'Ali berkuasa selama lima tahun sejak awal kepemimpinannya, beliau selalu mendapatkan rongrongan dari kelompok umat Islam sendiri yaitu kaum khawarij serta peperangan berkepanjangan dengan kelompok Mu'awiyah yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang independen di daerah Syiria dan Mesir.

Ketegasan dan kebersihan 'Ali dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme nampak dengan menolak saudaranya yang meminta bantuan kepada 'Ali sebagai kepala negara. Suatu hari saudaranya, Aqil datang kepadanya meminta bantuan uang, akan tetapi 'Ali menolak karena hal itu sama dengan mencuri uang milik masyarakat. Kemudian Aqil pergi menemui Mu'awiyah mengajukan permohonan yang sama dan dia diberi uang dalam jumlah yang besar.

### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka pikir merupakan gambaran umum hubungan antar variabel, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut pada gambar 2.1:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



**Sumber data: Diolah Tahun 2020**

Keterangan :

→ : Uji Parsial

--- : Uji Simultan

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>77</sup>

Secara umum hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$H_0$  : Variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y

$H_a$  : Variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y

Hipotesis dalam penelitian ini berfungsi sebagai dugaan sementara atas rumusan masalah dalam penelitian. Adapun berdasarkan masalah pokok dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara yang selanjutnya akan diuji sebagai berikut:

##### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan untuk mengukur tingkat kemandirian dimasing-masing daerah. Kuncoro menjelaskan bahwa mengoptimalkan dan mengelola pendapatan asli daerah dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kemudian selanjutnya akan berdampak kepada penekanan tingkat pengangguran, dibutuhkan pengelolaan alokasi anggaran untuk salah satu strategi pengelolaan pendapatan yaitu melalui belanja dan pembiayaan. Strategi alokasi anggaran melalui belanja dan pembiayaan dapat mendorong serta mempercepat

---

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), H.64.

pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi alat untuk menurunkan tingkat pengangguran pengangguran.<sup>78</sup>

Jika setiap daerah mampu meningkatkan kualitas sistem penerimaan Pendapatan Asli daerah, lalu mengalokasikan pengeluaran melalui belanja dan pembiayaan secara efektif dan efisien, serta mengoptimalkan dan mengelola anggarannya dengan baik, maka pembangunan di daerah dapat meningkat dan kondisi perekonomian yang stabil membuat pertumbuhan ekonomi semakin baik. Hal ini akan mendorong kenaikan permintaan agregat yang diikuti dengan kenaikan penawaran agregat, sehingga ada peningkatan kebutuhan tenaga kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja. Dengan kata lain, lapangan kerja bagi penduduk akan tercipta dan tingkat pengangguran dapat mengalami penurunan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Riski Prasetyo Putro dengan judul penelitian Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatra Selatan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, dapat dikatakan bahwa 1 persen realisasi Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,15 persen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati dan Hamzah Dari penelitiannya mendapatkan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan negative terhadap pengangguran. PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada pengurangan dan kemiskinan. Pada pengaruh tidak langsung, PAD berpengaruh terhadap pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar  $0,363 \times 0,467 = 0,1695$  atau 16,95%.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Suwandika dan I Nyoman Mahaendra Yasa dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Daerah tidak

---

<sup>78</sup> Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2004), H.87.

Langsung di Kabupaten/Kota Bali. PAD berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran. berdasarkan hasil analisis dalam penelitiannya dijelaskan bahwa variabel PAD berpengaruh terhadap turunannya tingkat pengangguran di daerah. Ini berarti meningkatnya PAD dapat memicu tumbuhnya usaha-usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat menurunkan dan menekan tingkat pengangguran yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di atas, maka dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub>: Pendapatan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

## **2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung.**

Penyaluran DAU dan DBH bersifat *unconditional grant* atau *block grant* di mana pemerintah pusat tidak mensyaratkan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran sehingga bisa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah sedangkan penyaluran DAK bersifat *specific grant* karena penyalurannya ditujukan secara khusus untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional.

Dengan sifat *unconditional grant* atau *block grant* penyaluran DAU dan DBH dapat disalurkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menyalurkan DAU dan DBH diharapkan dapat membangun perekonomian di daerah serta dapat meningkatkan kondisi perekonomian kearah yang stabil sehingga dapat menekan tingkat pengangguran melalui belanja daerah yang efektif dan efisien. Setiap dana yang diperoleh tentunya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengalokasian dana yang tepat utamanya dari dana perimbangan dalam perannya mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini akan mendorong kenaikan permintaan agregat yang diikuti dengan kenaikan penawaran agregat, sehingga ada peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Dengan

kata lain, lapangan kerja bagi penduduk akan tercipta dan tingkat pengangguran dapat mengalami penurunan.

Dalam penelitian Romi Andriansyah dengan judul penelitian Pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Kabupaten dan Kota Kalimantan Barat tahun 2009-2013 dan didapatkan hasil bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran sebesar -1.303488.<sup>79</sup>

Dari hasil penelitian diatas maka dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ha<sub>2</sub>: Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

### **3. Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung.**

Melalui belanja pemerintah Negara atau pemerintah daerah dapat memicu aktivitas ekonomi di masyarakat. Dengan meningkatkan belanja, pemerintah mampu menaikkan keseimbangan yang terbentuk oleh permintaan dan penawaran agregat. Perubahan ini akan menambah kesempatan kerja bagi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran. Pengeluaran pemerintah daerah atau belanja daerah ialah salah satu instrument penting guna mengontrol perekonomian. Pada sekian banyak komponen yang ada pada laporan APBD di sebutkan jika kinerja keuangan bisa terpengaruh dengan adanya belanja daerah. Diartikan semakin banyak belanja maka makin tinggi juga produktivitas perekonomian, pada hal ini ialah kinerja keuangan pemerintah diukur.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Romi Andriansyah, Pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Kabupaten dan Kota Kalimantan Barat tahun 209-2013, Jurnal Pembangunan dan Pemerataan, Vol.5 No.2, 2016.

<sup>80</sup> Wardana, Rangg, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap PDRB (Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat)*, (Fakultas Ekonomi Universitas AndalasPadang, Sumatera Barat) Skripsi 2014.



Penelitian yang dilakukan Oleh Putu Eka Suwandika dan I Nyoman Mahaendra Yasa dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Daerah tidak Langsung di Kabupaten/Kota Bali terdapat hasil bahwa belanja tidak langsung merupakan indikator penurunan tingkat pengangguran.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Riski Prasetyo Putro dengan judul penelitian Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatra Selatan mendapatkan hasil bahwa belanja modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, atau dapat dikatakan bahwa setiap seratus miliar Rupiah belanja modal yang dikeluarkan, akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,08%.

Berdasarkan Penjelasan dan hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut:

**a. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung**

Ha<sub>3</sub>: Belanja Pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

**b. Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung**

Ha<sub>4</sub>: Belanja Barang dan Jasa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

**c. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat pengangguran di Provinsi Lampung**

Ha<sub>5</sub>: Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2008. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul, Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul, Halim. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat: jakarta.
- Adiwarma, Azwar Makarim. 2007. *Ekonomi Makro Islam Edisi ke tiga*. Depok: PT. Raja Grafindo Persda.
- Agus Tri Basuki, Nano Prawoto. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews, Edisi 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ai Siti Farida. 2010. *Sistem Ekonomi Indonseia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amir Machmud. 2016. *Perekonomian Indoneisa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Asfia, Murni. 2006. *Ekonomika Makro*. Bandung: Refika Aditama.
- Awaniz, Berlian Nur. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karasidenan Pekalongan*. Skripsi. 2011 Universitas Negeri Semarang.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2020. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Februari 2020*. Lampung: BPS Prov Lampung.
- Bank Indonesia. 2018. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional*. Lampung: Bank Indonesia.

- Budi, Mulyana, et al. 2006. *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta: LPKPAP.
- DR. Machfud Sidik, M.Sc. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jogjakarta:Departemen Keuangan RI.
- Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati. 2018. *analisis indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten bojonegoro*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma. Vol 18 No.2.
- Gempur Santoso. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Gusfahmi, SP. 2011. *Pajak Menurut Syariat*. Jakarta:Rajawali Pers.
- H.A.W. Widjaja.2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indraningrum Tri, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali.2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Imam Ghazali.2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS23*. Badan Penerbit UNDIP, Cet. VIII: Semarang.
- Kemenag RI Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS Attaubah (9): 105. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.

- Labor Force Situation of Lampung Province. 2018. *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Lampung 2018*. Lampung : BPS-Statistics Lampung Province.
- Lukman Hakim. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Marianus Manek & Rudy Badrudin. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.*, NTT: Telaah Bisnis. Vol. 17, No. 2.
- Mankiw N, Gregory. 2013. *Teori Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Bogor Selatan.
- Murni. 2006. *Ekonomika Makro*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Nazori Majid. 2003. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf : Relevansinya dengan ekonomi kekinian*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Mudrajad, Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mustafa Edwin Nasution, et.al. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ni Luh Gede Cintya Adriani, I Nyoman Mahaendra Yasa. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Daerah tidak Langsung di Kabupaten/Kota Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana: Bali. Vol.4, No.11.
- Nor, H.F. 2015. *Ekonomi Publik: Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : PT. indeks.

- Nurmalia Hasana dan Achmad Fauzi. 2017. *Akuntansi Pemerintah*. In Media Jakarta.
- Pasal 157 Undang-Undang No. 32/2004 tentang *Pemerintahan Daerah* dan Pasal 6 Undang-Undang No. 33/2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah No.55 Pasal 60 Ayat (3) Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ayat (1) Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang *Mekanisme Pengelolah Hibah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang *Klasifikasi Anggaran*.
- Riski Prasetyo Putro. 2016. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran Di wiayah Sumatra*. Indonesian Treasury Review. Vol.1, No.2.
- Romi Andriansyah. 2016. *Pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Kabupaten dan Kota Kalimantan Barat tahun 209-2013*. Jurnal Pembangunan dan Pemerataan. Vol.5 No.2.

- Rudy Badrudin.2011. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sadono Sukirno. 2000. *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno. 2004. *Pengantar Teori Ekonomi, edisi ke 3*. PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Sadono, Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Sadono Sukirno. 2017. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2007. *Penelitian Administratif*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Bandung : Alfabeta.
- Todaro, Michael. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Tohar, M. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Jakarta: Kanisius.
- T. Gilarso. 2007. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

- Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 33/2004 Pasal 157 tentang *Pemerintahan Daerah* dan Pasal 6 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Usman Rianse dan Abdi.2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Alfabeta, Cet-3: Bandung.
- Wardana, Rangga. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap PDRB (Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat)*. Fakultas Ekonomi Universitas AndalasPadang, Sumatera Barat. Skripsi 2014.
- Walalangi, Stasya, Rosalina A.M. Koleangan dan Hanly F.DJ. Siwu. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi:2017),Vol.17.
- Yuliati.2000. *Akutansi sektor public cetakan kelima*. Salemba Empat, Jakarta.
- Yuniarti. 2020. *Pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal terhadap pengangguran yang di intervening oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Pembangunan dan Pemerataan. Vol 9, No.2.
- Yusuf al-Qardawi. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Zakaria. 2015. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan dikota Potianak*. Jurnal Pembangunan dan Pemerataan. Vol. 4, No.4.